RUMUSAN SEMENTARA

HASIL RAKORNAS BPSDM PROVINSI SELURUH INDONESIA

DAN BKPSDM KABUPATEN/KOTA TERPILIH

Rakornas BPSDM Tahun 2018 telah dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 7 November 2018 yang dihadiri oleh para Pejabat BPSDM Kemendagri, Kepala BPSDM Provinsi atau sebutan lain, dan Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota atau sebutan lain secara terpilih, dengan tema: “*KerjasamaDalam Negeri dan Luar Negeri dalam rangka peningkatan kinerja BPSDM dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri*”. Rakornas dimaksud dibuka oleh Kepala BPSDM Kemendagri, dihadiri Gubernur Bangka Belitung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, bertempat di Grand Hatika Hotel, Belitung.

Dalam Rakornas BPSDM telah disampaikan pokok-pokok pikiran terkait kebijakan dan program pengembangan SDM dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan NGO.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan kompetensi ASN, peserta Rakornas **bersepakat** untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang pengembangan kompetensi ASN, sebagaiberikut:

1. Kerjasama Dalam Negeri:
2. Memperkuat penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (DiklatpimPemdagri) sesuai dengan Permendagri Nomor 85 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.
3. Penyelenggaraan Orientasi tugas anggota DPRD.
4. Penyelenggaraan Latihan Dasar (Latsar) bagi CPNS yang baru diangkat.
5. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif pemerintahan dalam negeri lingkup Kemendagri dan Pemda.
6. Mengembangkan kerjasama daerah: antarkabupaten/kota, antarprovinsi, antar kabupaten/kota di dalam provinsi dan di luar provinsi, antarkabupaten/kota dengan provinsi, antar daerah dengan Kementerian/Lembaga dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kerjasama Luar Negeri:
8. Mengembangkan kerjasama daerah dengan pemerintah di luar negeri berdasarkan persetujuan pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Mengembangkan kerjasama daerah dengan pihak ketiga dan *Non Government Organization* (NGO) di luar negeri berdasarkan persetujuan pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10. BPSDM Kemendagri memfasilitasi kerja sama pengembangan SDM dengan K/L teknis dan berbagai pihak luar negeri.
11. Implementasi Program/Kegiatan BPSDM Provinsi dan BKPSDM Kabupaten/Kota Tahun 2019:
12. Kemendagri (BPSDM, Ditjen OTDA, Ditjen KEUDA) mengawal BPSDM Provinsi dan BKPSDM Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan (pengembangan kompetensi) aparatur sipil negara dalam APBD T.A. 2019 sekurang-kurangnya 0,34% dari total belanja daerah bagi pemerintah Provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penyusunan APBD T.A 2019.
13. Memberikan pendidikan wawasan kebangsaan (wasbang) yang memuat materi wasbang pada diklat tertentu dalam rangka membangun karakter bangsa,bela negara, penyelenggaraan pengembangan kompetensi revolusi mental bagi aparatur sipil negara.
14. BPSDM Provinsi dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi ASN dapat menerima biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota sepanjang sudah mempunyai dasar hokum yang mengatur penerimaan biaya dari APBD Kab/Kota, atau melalui pola fasilitasi kepada Kabupaten/Kota.
15. Peningkatan sarana dan prasarana BPSDM Provinsi dan BKPSDM Kabupaten/Kota agar penyelenggaraan pengembangan kompetensi (Pendidikan dan Pelatihan) aparatur sipil negara (ASN) dapat berlangsung dengan baik.
16. Mempercepat perubahan nomenklatur dari kelembagaan Pendidikan dan Pelatihan menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten/Kota sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Hasil Rakornas BPSDM Kemendagri Tahun 2018 disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Se-Indonesia melalui surat Menteri Dalam Negeri dan monitoring evaluasi implementasinya oleh BPSDM Kemendagri, Ditjen Keuangan Daerah dan Ditjen Otonomi Daerah untuk usulan pemerintah provinsi dan monitoring evaluasi implementasi oleh BPSDM Provinsi untuk usulan BKPSDM Kabupaten/Kota.

Belitung, 7 November 2018

a.n. PesertaRakornas

(Daftar HadirTerlampir)